

**PERAN INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA TIMUR
(STUDI KASUS : DAERAH PAPUA)**

Oleh:

Ega Mentari

Email : egamentari29@gmail.com

Pembimbing : Drs. Trijoko Waluyo M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this research is to understand how the role of one of these international organizations in achieving their goals of providing assistance, loans or capital that is used for economic development, especially in areas such as agricultural or farm. Furthermore, the coverage area will be described which includes the eastern Indonesian region which is a region that still need special attention welfare issues of society. In this case that would be the focus of the study authors is in the eastern Indonesian region of Papua.

This research theoretically has built with Pluralism perspectives on International Relations and supported by International Organization theory T. May Rudi and Role Theory. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Technique in this research is through by the study of library. Data which is gotten and collected through the journal books, the last thesis and then from internet has related to the problems.

Researcher has formulated answered-hypothesis which reveals the fact that the role of international fund for agricultural development in eastern Indonesia, especially Papua is as a facilitator and a source of funding or loans to the public so that in the area of Papua IFAD made 2 program, the National Program for Community Empowerment (PNPM) and Coastal Community Development Project (CCDP).

Keywords : *The Role, International Organization, IFAD, Fund, Economic, Eastern Indonesia, Papua*

PENDAHULUAN

Pada masa setelah perang dunia kedua, dunia dihadapkan dengan pembagian negara-negara berdasarkan kelompok masing-masing, seperti negara dunia pertama, kedua, dan ketiga. Istilah negara dunia ketiga sering dikategorikan sebagai negara yang baru merdeka pasca perang dunia kedua kemudian

seiring berjalannya waktu istilah dunia ketiga digunakan untuk menyebut negara-negara berkembang yang berjuang mencapai pembangunan ekonomi yang stabil seperti halnya Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Negara berkembang merupakan negara baru berdiri dan memerdekakan diri setelah berakhirnya perang dunia kedua. Negara berkembang

dijelaskan sebagai negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah.¹ Dengan demikian Negara berkembang juga diidentikkan dengan negara yang masih dalam tahap pembangunan.

Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang yang ciri-ciri negara tersebut memiliki pendapatan nasional per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan yang berada di angka rata-rata dibawah negara maju. Indonesia merupakan negara yang baru memerdekakan diri pasca perang dunia kedua. Pembangunan sebuah negara menuju negara berkembang tidak mudah terlebih Indonesia juga harus melepaskan diri dari penjajahan.

Saat awal pembangunan nasional dimulai pada tahun 1970an, isu yang diangkat adalah membangun ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera. Pada umumnya pemikiran tentang pembangunan di negara-negara belum berkembang (*underdevelopment*) selalu meletakkan kemiskinan sebagai isu sentralnya. pemikiran seperti ini diterjemahkan menjadi kurangnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memuaskan kebutuhan dasar atau kemampuan untuk menuntun dirinya menjadi manusia seutuhnya.² Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut yang akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk miskin menurut BPS sepuluh tahun terakhir (1996-2008) rata-rata 18,9%.

Tabel Presentase jumlah penduduk miskin Indonesia

¹ *Statistics | Human Development Reports (HDR) | United Nations Development Programme (UNDP)*, dalam <http://hdr.undp.org/en/statistics/> diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 12:10 Wib

² Levine, David P and Abu Turab Rizvi. (2005), *Paverty Work Freedom; Political Economy and the Moral Order*, hal. 41 Cambridge University Press, Cambridge.

Prosentase Penduduk Miskin (%)			
(Di bawah garis kemiskinan)			
Tahun	Kota	Desa	Kota+ Desa
1996	13,39	19,78	17,47
1997	**	**	**
1998	21,92	25,72	24,23
1999	19,41	26,03	23,43
2000	14,60	22,38	19,14
2001	9,76	24,84	18,41
2002	14,46	21,10	18,20
2003	13,57	20,23	17,42
2004	12,13	20,11	16,66
2005	11,68	19,98	15,97
2006	13,47	21,81	17,75
2007	12,52	20,37	16,58
2008	11,65	18,93	15,42
Rata-rata	14,05	21,77	18,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/34> diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 13:30 Wib

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa angka kemiskinan Indonesia masih menginjak angka yang tinggi. Tinggi nya jumlah penduduk miskin Indonesia menunjukkan kurangnya pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tingkat kemiskinan pun nyatanya terbagi dalam berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau besar seperti Jawa dan Sumatera mendominasi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Selain itu, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta wilayah Indonesia Timur belum merata pembangunannya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun,

angka kemiskinan itu terbilang tinggi. Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan.³

Dari data statistik yang telah dijelaskan diatas, wilayah Papua yang merupakan bagian dari Indonesia Timur menjadi wilayah termiskin di Indonesia. Kemiskinan ini menyangkut kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penulis menilai dari data tingkat kemiskinan maka kita dapat melihat tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Papua seperti yang telah kita ketahui merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam terutama gas dan mineral namun, dari segi pembangunan di wilayah tersebut belum terlalu merata sehingga hal ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi perkembangan masyarakat.

Papua merupakan wilayah yang perekonomiannya didominasi oleh sector pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 54,11 % dan sebaliknya di sektor pertanian 12,28 %. Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar yang berpusat di daerah Papua. Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), berdasar data sebaran produksipangan utama tahun 2010, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan dagingsapi, berturut-turut wilayah Papua memiliki kontribusi sebesar 0,22 persen, 0,05 persen, 0,53 persen, 0,50 persen dan 1,01 persenterhadap produksi nasional. Wilayah Papuamempunyai cadangan minyak sebesar 94,93 MMSTB dengan cadangan gas sebesar 24,32TSCF. Wilayah ini juga kaya akan

³10 Provinsi Paling Miskin di Indonesia, dalam <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/173118-10-propinsi-paling-miskin-di-indonesia> diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 15:30 Wib

cadangan batubara yaitu sebesar 156,8 juta ton.⁴

Pertumbuhan ekonomi yang stabil telah mengurangi angka kemiskinan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan tahun 2004 yang memiliki angka 17 persen menjadi 13 persen di tahun 2010. Meskipun demikian, angka kemiskinan yang menurun, kenyataannya penduduk miskin tetaplah miskin disbanding saat krisis 1997. Harga pangan dan biaya kesehatan yang malah akan sangat mudah mendorong mereka jatuh dalam kemiskinan.⁵

Kemiskinan yang paling parah terdapat di pulau - pulau terpencil yang terletak dikawasan timur Indonesia, di mana 95 persen penduduk di perdesaan termasuk masyarakat miskin. Banyak petani di wilayah bagian timur sulit termasuk petanisubsisten. Wilayah ini adalah rumah bagi penduduk asli yang masih tradisional, ataumasyarakat adat, yang sering tertinggal dari proses dan program pembangunan. Wilayah pesisir yang telah rusak lingkungannya, dan desa di dataran tinggi merupakan wilayah paling tertinggal dan membutuhkan program pembangunan yang disesuaikan dengan berbagai kendala yang dihadapi penduduk di wilayah tersebut termasuk isolasi daerah dan kesulitan akses. Migrasi ke perkotaan seringkali menjadi pilihan utama untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap lahan dan sumber daya produktif lainnya.⁶

⁴Pengembangan Wilayah Papua tahun 2012. Dalam http://bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11240/3770/. Diakses pada 4 April 2016 Pukul. 19:00 Wib

⁵Mendorong Masyarakat Miskin di Pedesaan untuk mengatasi kemiskinan Indonesia, dalam http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pi/factsheets/indonesia_bahasa.pdf. diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 16:04 Wib

⁶*Ibid.*,

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan pada tahun 1977. IFAD merupakan salah satu hasil keputusan dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974. Konferensi tersebut merupakan tanggapan atas krisis pangan yang terutama melanda negara di Afrika di awal tahun 1970an. Konferensi tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan internasional yang berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian. Misi IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan dengan tujuan menghapuskan kemiskinan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75% penduduk miskin di dunia, sejumlah 720 juta manusia hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung dengan aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya.⁷

Sejak tahun 1980, IFAD telah memberikan pinjaman kepada Republik Indonesia untuk membiayai 14 program dan proyek senilai US\$ 383.700.000. Sebelas dari program dan proyek telah selesai dilaksanakan, sedangkan tiga proyek lainnya masih berjalan. Disamping itu, IFAD telah memberikan sejumlah dana hibah untuk mendukung berbagai proyek di Indonesia.

Pada bulan Desember 2008, Dewan Eksekutif IFAD telah menyetujui Program Strategis IFAD (COSOP) untuk Indonesia periode 2009-2013. Tujuan dari intervensi IFAD di negaraini adalah memberdayakan perempuan dan laki-laki miskin pedesaan dalam meningkatkan keamanan pangan,

⁷ *International Fund for Agricultural Development*, dalam <http://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/INTERNATIONAL-FUND-FOR-AGRICULTURAL-DEVELOPMENT-IFAD.aspx> diakses pada 5 Maret pukul. 12:10 Wib

meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Dukungan IFAD berfokus pada pengembangan pertanian berskala kecil dan agribisnis masyarakat lokal, sehingga membuka pasar baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan. Strategi IFAD adalah pada mayoritas kelompok yang termasuk 'hampir miskin', hampir mendekati garis kemiskinan, dan berfokus pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, baik miskin dan hampir miskin. Program IFAD membantu mengurangi kerentanan petani terhadap guncangan eksternal yang dapat dipicu oleh iklim yang ekstrim sebagai akibat dari perubahan iklim, bencana alam atau gejolak pasar global.⁸

Adapun bantuan/pinjaman IFAD sampai dengan tahun 2011 berkisar US\$776,3 juta yang US\$ 387,7 juta di antaranya merupakan "loan" dan terdiri dari 14 proyek. Pada akhir 2011, tersisa 3 (tiga) proyek yang belum diselesaikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).⁹ Wilayah Papua yang dibantu oleh IFAD adalah dilaksanakan di 12 kabupaten kota. Salah satunya Parepare. Adapun kelurahan yang mendapatkan bantuan CCD IFAC adalah Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Tiro Sompe,

⁸ *Mendorong Masyarakat Miskin di Pedesaan untuk mengatasi kemiskinan Indonesia*, dalam http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pi/factsheets/indonesia_bahasa.pdf. diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 16:04 Wib

⁹ *Ifad*. Dalam <http://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/INTERNATIONAL-FUND-FOR-AGRICULTURAL-DEVELOPMENT-IFAD.aspx> diakses pada 16 Maret 2016 Pukul. 12:30 Wib

Kelurahan Lumpue, Kelurahan Cappa Galung, dan Kelurahan Kampung Pisang.¹⁰

Dalam menyelesaikan masalah dalam negeri, pemerintah biasanya mendapatkan bantuan dari banyak pihak termasuk organisasi internasional yang tergabung dalam negara-negara didalamnya. Organisasi yang menangani masalah kemiskinan dan pembangunan perekonomian di daerah pedesaan ialah *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). IFAD merupakan salah satu organisasi dibawah PBB yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan berbentuk pinjaman atau modal yang dipergunakan untuk pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan.

IFAD telah memberikan bantuan ke Indonesia sejak tahun 1980-an dan sasaran yang ditujukan ialah masyarakat Indonesia Timur seperti Papua, Sulawesi, dan Maluku. Pada bulan Desember 2008, Dewan Eksekutif IFAD telah menyetujui Program Strategis IFAD (COSOP) untuk Indonesia periode 2009-2013. Dengan demikian IFAD mempunyai program-program yang dijalalankannya untuk mengembangkan perekonomian pedesaan.

PEMBAHASAN

International Fund for Agricultural Development (IFAD) merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini didirikan pada Desember 1977 yang berkantor pusat di Roma, Italia. Pembentukan IFAD merupakan tindak lanjut atas salah satu hasil utama dari Konferensi Pangan Dunia (*World Food Conference*) yang diselenggarakan pada tahun 1974. Konferensi tersebut diselenggarakan sebagai respon terhadap krisis pangan yang terjadi pada awal 1970-an terutama yang melanda negara-

negara di Afrika. Konferensi tersebut memutuskan “dana internasional” untuk negara-negara berkembang.¹¹

Presiden IFAD saat ini dijabat oleh Mr. Kanayo F. Nwanze (Nigeria) yang mulai menjabat pada tahun 2009 (untuk periode 2009 – 2013) dan dapat diperpanjang satu kali. Dalam sidang IFAD tahun 2013, yang bersangkutan kembali terpilih hingga empat tahun ke depan (2014 – 2018).¹²

Dalam visi misi IFAD adalah bertujuan untuk menjadi katalis global investasi yang memungkinkan untuk pertanian rakyat sehingga mendorong kemajuan menuju ketahanan pangan dan gizi, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan ekosistem.¹³ Visi tersebut merupakan sebuah visi untuk pertanian rakyat dan sebuah visi untuk IFAD dalam konteks global. IFAD bertujuan untuk membantu pembangunan pertanian dan mengatasi masalah pangan di negara-negara berkembang. Sasaran utamanya adalah petani-petani yang tergolong dibawah garis kemiskinan agar dapat meningkatkan pendapatannya.

Keanggotaan IFAD terbuka bagi semua negara yang merupakan anggota PBB atau badan-badan khusus lainnya. Keanggotaan IFAD terdiri atas; anggota asli (*original members*) dan anggota tidak asli (*non original members*). Anggota asli adalah negara yang menjadi anggota sejak IFAD didirikan yang berjumlah 61 negara, terdiri atas 20 negara list A (negara-negara maju), 12 negara list B (negara-negara anggota OPEC), dan 29 negara list C (negara-negara lainnya yang menjadi anggota IFAD setelah IFAD

¹⁰ CCD IFAD, dalam <http://radarpare.com/ccd-ifad-prepare-terbaik-di-indonesia/>) diakses pada 11 Maret 2016 Pukul. 14:00 Wib

¹¹ *Who we are*, dalam <https://www.ifad.org/who/overview> diakses pada 7 April 2016 Pukul 10:15 Wib

¹² *Ibid.*,

¹³ *IFAD's Strategic Vision to 2015*, dalam <https://www.ifad.org/documents/10180/ec3289d0-77cf-4ba6-bd60-1808cc469632>. Diakses pada 7 April 2016, pukul. 10:36

didirikan. Sampai dengan saat ini anggota IFAD berjumlah 163 negara.¹⁴

Sebuah negara yang menjadi anggota IFAD berarti negara tersebut telah meratifikasi perjanjian multilateral yang dikenal sebagai perjanjian mendirikan Dana Internasional untuk pembangunan pertanian. Dewan Pengurus adalah negara-negara anggota yang merupakan pengambil keputusan tertinggi serta memiliki otoritas penuh. Dalam hal ini negara masing-masing diwakili oleh gubernur dan gubernur alternatif. Dewan bertemu setiap tahunnya. *Dewan Eksekutif* bertanggung jawab untuk mengawasi operasi umum IFAD dan menyetujui dana pinjaman dan hibah. terdiri dari 18 anggota dan 18 anggota pengganti. Presiden, yang melayani untuk jangka empat tahun (sekali terbarukan), adalah CEO IFAD dan ketua Dewan Eksekutif. Saat ini, dan kelima, Presiden IFAD adalah Kanayo F. Nwanze, yang terpilih untuk masa jabatan empat tahun pertama pada tahun 2009. Pada Februari 2015, IFAD memiliki 176 negara anggota.¹⁵

Sesuai dengan mandatnya, tujuan utama IFAD adalah untuk memberikan bantuan langsung dan memobilisasi dana tambahan untuk program yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan non pertanian. Target grup dari IFAD adalah orang-orang yang paling miskin di dunia, petani, masyarakat yang tidak mempunyai lahan pengembala yang tidak mempunyai tempat tinggal, nelayan, masyarakat local dan wanita pedesaan yang miskin. Sejalan dengan bantuan IFAD yang difokuskan pada

pengentasan kemiskinan dan masyarakat pedesaan di negara-negara sedang berkembang, pinjaman dana disediakan untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah dengan jangka waktu pinjaman selama 40 tahun dengan 0,75 % persen pertahun. Pinjaman dana tersedia pula dalam bentuk setengah komersial dan komersil. Kerangka kerja strategi IFAD menggambarkan bagian dari komitmen global untuk mengembangkan “ *the Millenium Development Goals*” (MDG).¹⁶

IFAD akan melanjutkan bekerja dengan mengarahkan sasaran kepada masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui pengembangan pembangunan sosial, kesamaan gender, peningkatan pendapatan, peningkatan status gizi, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan *good governance*. Dikarenakan permasalahan masyarakat miskin sangat kompleks, usulan pemecahan yang dibutuhkan banyak hal yang harus diperhatikan disamping itu harus dapat diterima dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Masyarakat miskin membutuhkan akses yang tidak sedikit diantaranya akses terhadap asset, kehidupan, sosial, alam, infrastruktur, teknologi, dan keuangan yang terkendali dalam kehidupan sehari-hari.

Pembagian Wilayah Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari

¹⁴ *Keanggotaan IFAD*, dalam www.ifad.org/governance/ifad.htm diakses pada 7 April 2016 pukul. 12:58

¹⁵ *"IFAD member states". International Fund for Agricultural Development*, dalam <http://www.ifad.org/governance/ifad/ms.htm> diakses pada 7 April 2016 Pukul. 11:12 Wib

¹⁶ *International Fund for Agricultural Development*, dalam <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/396/jbptunikompp-gdl-randyisnad-19779-11-11.bab-i.pdf> diakses pada 7 April 2016 Pukul. 10:50 Wib

17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.¹⁷

- **Indonesia bagian Barat**

Indonesia bagian barat merupakan pembagian wilayah Indonesia berdasarkan letak wilayahnya yang berada di sebelah Barat Indonesia. Wilayah Indonesia bagian Barat ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

- **Indonesia Bagian Timur**

Indonesia Timur secara geografis dan kawasan pembangunan (menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993) terdiri dari Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Indonesia Timur juga dapat merujuk kepada Negara Indonesia Timur, bekas negara bagian di Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Waktu Indonesia Timur, salah satu dari tiga zona waktu di Indonesia.

Ketimpangan Pembangunan Indonesia Barat & Timur

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang semakin berorientasi kepada mekanisme pasar serta adanya pergeseran struktur perekonomian, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari. Kesenjangan antardaerah terjadi terutama antara perdesaan dan perkotaan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan hinterland dengan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Berbagai bentuk kesenjangan yang timbul meliputi kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Kesenjangan yang ada juga diperburuk oleh faktor tidak meratanya potensi sumber daya terutama sumber daya manusia dan sumber daya alam antara daerah yang satu dengan yang lain, serta kebijakan pemerintah yang selama ini terlalu sentralistis baik dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan

¹⁷ *Geografi Indonesia*, dalam <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia> diakses pada 9 April 2016 Pukul. 16:20 Wib

Kondisi Kemiskinan dan Perekonomian Masyarakat Indonesia Timur

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.¹⁸

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Pertumbuhan penduduk dengan kepadatan yang lebih besar akan menyebabkan timbulnya kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat tidak meratanya penyebaran penduduk yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya manusia yang kurang efektif. Namun, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Banyak program-program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan antara lain yaitu meningkatkan program PNPM mandiri, subsidi BBM, pembagian BLT dan program asuransi kesehatan.

¹⁸ *Kemiskinan*, dalam <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/57478/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada 14 April 2016 Pukul. 15:00 Wib

Kondisi Wilayah Papua

Wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumberdaya alam sangat besar di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah. Wilayah Pulau Papua terletak di posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Dengan posisi tersebut, pengembangan wilayah Pulau Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat dari ketertinggalan dan keterisolasian. Permasalahan tersebut antara lain: (1) tingginya angka kemiskinan, (2) rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan, (3) tingginya angka pengangguran, dan (4) terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial. Selain itu, wilayah Papua juga menghadapi berbagai permasalahan gangguan ketertiban dan keamanan, serta konflik sosial. Berbagai permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) rendahnya akses terhadap layanan jasa pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, (2) terbatasnya kegiatan ekonomi produktif yang menyerap angkatan kerja, (3) rendahnya investasi, (4) terbatasnya prasarana dasar seperti air minum dan sanitasi, jalan, pelabuhan, dan listrik, dan (5) terbatasnya akses terhadap layanan transportasi yang menghubungkan antarwilayah.¹⁹

Permasalahan Utama di Papua

Jumlah penduduk di Pulau Papua sekitar 2,8 juta jiwa atau 1,2 persen dari total penduduk nasional. Pulau Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah, hanya sebesar 7 jiwa per Km². Konsentrasi

penduduk tersebar di perdesaan dan pedalaman namun proporsi penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pergeseran kepadatan penduduk dari desa ke kota tersebut mengindikasikan tingginya tingkat urbanisasi di Pulau Papua.

Dalam perkembangannya, jumlah penduduk lokal di Pulau Papua relatif besar, akan tetapi proporsi penduduk pendatang terus meningkat. Tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, selain tingkat kematian dan migrasi. Jika dilihat TFR per provinsi di Pulau Papua, Provinsi Papua Barat mempunyai TFR 3,4 dan Provinsi Papua sebesar 2,8 (SDKI 2007).

Dalam bidang sosial dan budaya, tingginya angka kemiskinan dan belum memadainya jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang secara garis besar terjadi di Wilayah Papua. Pada tahun 2008, Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat adalah 35,12 persen dan Provinsi Papua 37,08 persen. Dari segi pertumbuhan jumlah penduduk miskin, Provinsi Papua mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin paling tinggi.²⁰

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan berbagai isu strategis yang perlu diatasi antara lain: ketersediaan dan ketahanan pangan terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, dan daerah rawan pangan; tingginya harga barang kebutuhan pokok selain beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu; tingginya biaya transportasi sebagai akibat terbatasnya infrastruktur transportasi; dan rendahnya produktivitas usaha.

¹⁹ *Pengembangan Wilayah Papua*, dalam https://nycixyance.files.com/2012/11/buku-iii-rkp-2010_250509_papua.pdf. Diakses pada 15 April 2016, Pukul. 14:35 Wib

²⁰ *Pengembangan Wilayah Papua*, dalam https://nycixyance.files.com/2012/11/buku-iii-rkp-2010_250509_papua.pdf. Diakses pada 15 April 2016, Pukul. 14:35 Wib

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendidikan menyangkut mahalanya biaya pendidikan, belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan rendahnya mutu pendidik. Selain itu, secara garis besar isu strategis dalam pelayanan pendidikan antara lain adalah (1) optimalisasi mekanisme pembiayaan yang ada dengan mengutamakan perhatian terhadap anak murid sekolah dari keluarga miskin, (2) pengelolaan dana otonomi khusus bagi perbaikan layanan pendidikan, (3) manajemen sekolah berbasis asrama (boarding school), (4) koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah.²¹

Peran IFAD di Indonesia

IFAD di Indonesia sudah sejak tahun 1980. IFAD telah membuat proyek dan bekerja di daerah terpencil yang rentan. Biasanya di negara-negara dengan kondisi kemiskinan tertinggi. Di Papua misalnya, IFAD masuk melalui proyek PNPM Pedesaan Pertanian. IFAD juga berhasil mendukung masyarakat pesisir dengan mampu membantu mereka dari guncangan perubahan iklim dan dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan nelayan. Perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.²²

Keanggotaan Indonesia dalam IFAD memberikan berbagai manfaat, di antaranya Indonesia dapat memperoleh bantuan program melalui proyek-proyek termasuk pembiayaannya dalam bentuk pinjaman berjangka panjang (40 tahun) dengan bunga rendah; Proyek-proyek IFAD diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ditujukan secara khusus kepada masyarakat miskin di daerah terpencil yang berbasis pertanian; IFAD menyelenggarakan workshop tentang pengumpulan data dan penyebaran informasi

²¹*Ibid.*,

²²*Ibid.*,

mengenai proyek-proyek IFAD guna pelaksanaan proyek-proyek secara lebih baik di masa datang: Indonesia menerima masukan mengenai penanggulangan kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang.²³

Adapun bantuan/pinjaman IFAD sampai dengan tahun 2011 berkisar US\$776,3 juta yang US\$ 387,7 juta di antaranya merupakan “loan” dan terdiri dari 14 proyek. Pada akhir 2011, tersisa 4 (tiga) proyek yang belum diselesaikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).²⁴

Strategi IFAD di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi yang besar di Asia Tenggara dan telah berkembang pesat dalam dekade terakhir menjadi negara demokrasi electoral yang dinamis, sangat kompetitif dan desentralisasi. pertumbuhan ekonomi yang stabil telah menyebabkan penurunan bertahap dalam kemiskinan secara keseluruhan di negara itu, yang jatuh dari 17 persen di tahun 2004 menjadi 11 persen pada 2014. Meskipun demikian, hampir 40 persen penduduk Indonesia masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan nasional.²⁵

Program-Program Kerja IFAD di Indonesia

kegiatan IFAD dipandu oleh Kerangka Strategis memungkinkan orang pedesaan yang miskin untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan pendapatan mereka dan memperkuat ketahanan mereka. Sejak

²³ *International Fund For Agricultural Development*, dalam <http://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/INTERNATIONAL-FUND-FOR-AGRICULTURAL-DEVELOPMENT-IFAD.aspx> diakses pada 16 April 2016, pukul. 19:33 Wib

²⁴*Ibid.*,

²⁵ *Investin in Rural People in Indonesia*, dalam <https://www.ifad.org/documents/10180/98c0dba4-1d1d-4c6b-9b79-0b85f759cab1>. Diakses pada 16 April 2016 Pukul. 23:35 Wib

tahun 1980, IFAD telah memperluas pinjaman kepada Indonesia selama 14 program dan proyek senilai US \$ 409.900.000. Sebelas dari program dan proyek telah selesai, dan empat yang sedang berlangsung. IFAD juga telah mendanai sejumlah negara dan daerah hibah untuk mendukung proyek-proyek investasi di negara ini. Berikut Program-Program Kerja selama IFAD di Indonesia, yaitu; Pemberdayaan Pedesaan dan Program Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (*Rural Empowerment and Agricultural Development Programme in Central Sulawesi*), Program Pasca-Krisis untuk Pembangunan Partisipatif Terpadu di Daerah Tadah Hujan (*Post-Crisis Programme for Participatory Integrated Development in Rainfed Areas*), Proyek Penghasilan untuk Petani Marginal dan Tak Bertanah – Tahap III / P4K (*Income-Generating Project for Marginal Farmers and Landless - Phase III (P4K - Phase III)*), Sistem Pertanian Rakyat Kepulauan Timur dan Proyek Pengembangan Ternak (*Eastern Islands Smallholder Farming Systems and Livestock Development Project*), Proyek Pengembangan Kacang Mete Perkebunan Rakyat Kepulauan Timur (*Eastern Islands Smallholder Cashew Development Project*), Proyek Pembangunan Penanaman Pohon Perkebunan Rakyat Sumatera Selatan (*South Sumatera Smallholder Tree Crops Development Project*), Proyek Pertanian Jawa Timur Wilyah Tadah Hujan (*East Java Rainfed Agriculture Project*), Proyek Meningkatkan Penghasilan Petani Marginal dan Tidak Bertanah (*Income-Generating Project for Marginal Farmers and Landless*), Proyek Pembangunan Perkebunan Sapi Rakyat Kedua (*Second Smallholder Cattle Development Project*), Proyek Pembangunan Perkebunan Sapi Rakyat Kedua (*Second Smallholder Cattle Development Project*), Proyek Ketujuh Belas Irigasi /Povinsi Jawa Timur (*Seventeenth Irrigation (East Java Province*

Project), dan Proyek Pengembangan Perkebunan Sapi Rakyat – Tahap I).

Program Kerja IFAD di Papua

❖ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

IFAD yang masuk ke Indonesia tahun 1980 telah membuat 14 Proyek, yang 11 diantaranya telah selesai, sedangkan terdapat 3 proyek yang sampai saat ini masih berjalan. Termasuk proyek pembangunan untuk daerah Papua. Program kerja IFAD di Papua dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.²⁶

Dengan pinjaman ini dan memberikan IFAD mendukung Pemerintah Program Nasional Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).PNPM bertujuan untuk mempromosikan terhadap partisipasi yang lebih besar dari masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan, memperkenalkan intervensi pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan mendukung pemerintahan lokal ditingkatkan.²⁷

Proyek IFAD didukung membantu pembangunan pertanian di daerah target pedesaan Papua dan Papua Barat, dua provinsi dengan populasi yang sebagian besar pribumi dan etnis. Secara khusus, ia menyediakan dana untuk proposal produktif yang dikembangkan oleh masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif. masyarakat lokal dan organisasi berbasis masyarakat, termasuk kelompok suku, juga berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dan memantau kemajuan di tingkat desa.²⁸

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara perbaikan di pedesaan dan

²⁶*National Programme for Community Empowerment in Rural Areas*, dalam <http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/indonesia/1341/project/overview> diakses pada 17 April 2016 Pukul. 20:31 Wib

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*,

pasar infrastruktur, pasokan air dan sistem irigasi dan akses terhadap layanan dasar di daerah pedesaan. Program ini memungkinkan masyarakat setempat untuk menggunakan dana untuk berinvestasi pada barang publik yang meningkatkan mata pencaharian pedesaan melalui tanaman dan pengembangan ternak, jaringan pasar dan pengembangan rantai nilai, dan juga dengan merangsang ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja.²⁹ Total biaya proyek ini mencapai US\$ 68.5 juta dengan durasi dari tahun 2008-hingga 2017.

- **Pengembangan yang Ditangani oleh Program**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan komitmen jangka panjang pemerintah untuk mempromosikan partisipasi yang lebih besar dari pedesaan, Populasi dalam pembangunan pedesaan, tata kelola dan pengurangan kemiskinan yang lebih baik dan untuk mengembangkan agenda kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung agenda tersebut. Dukungan IFAD kePNPM bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tata kelola di tingkat lokal di daerah pedesaan melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung proposal produktif yang dikembangkan oleh masyarakat, menggunakan proses perencanaan partisipatif.

Dana dari Pinjaman IFAD akan mengalir ke rekening khusus yang dipelihara di Amerika Serikat yang dioperasikan oleh Departemen Keuangan untuk diberikan kepada semua kategori pencairan IFAD. Dana Hibah IFAD akan mengalir ke rekening bank hibah yang dipelihara Departemen Keuangan Amerika Serikat. Lembaga yang bekerja sama untuk pembiayaan IFAD untuk PNPM adalah Bank Dunia. IFAD akan berpartisipasi dalam misi pengawasan.

²⁹*Ibid.*,

- **Target dan Partisipasi**

PNPM akan menjadi program nasional dari tahun 2009-2015 dengan dana yang disediakan untuk masing-masing kecamatan pedesaan. Kelompok sasaran tersebut ditujukan untuk 31.8 juta rumah tangga pedesaan. Dari jumlah ini, 20 persen, atau 23.600.000 orang (6,4 juta rumah tangga), hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dan 29 persen lainnya, atau 34 juta orang (9,2 juta rumah tangga), hidup di atas garis kemiskinan namun rentan untuk jatuh miskin. Di bawah dukungan IFAD untuk PNPM, IFAD akan memberikandukungan ditargetkan untuk pembangunan pertanian di 8 kabupaten dan 28 kecamatan pedesaan di dua provinsi yang sebagian besar dihuni oleh penduduk asli dan etnis,

PNPM adalah kerangka prioritas Pemerintah untuk semua masyarakat di masa depan serta pemberdayaan dan penanggulangan program kemiskinan di Indonesia. Pembiayaan IFAD melalui PNPM akan mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Pemerintah 2004-2009 dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG). Sesuai namanya Program ini akan memiliki empat komponen: (i) hibah; (ii) fasilitasi dan latihan; (iii) dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan (iv) dukungan untuk manajemen program.³⁰

- **Manajemen, tanggung jawab pelaksanaan dan kemitraan**

Mitra implementasi utama meliputi: (i) anggota masyarakat setempat; (ii) fasilitator dan staf di kecamatan, kabupaten dan provinsi; (iii) LSM dan penyedia layanan sektor swasta; dan (iv) Kementerian

³⁰ President's Report National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project, dalam <https://www.ifad.org/documents/10180/cf582a6e-b684-4c96-90c1-95db5138fd29> diakses pada 17 April 2016, Pukul. 21:12 Wib

Koordinator RakyatKesejahteraan, Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.³¹

Mitra implementasi utama meliputi: (i) anggota masyarakat setempat;(ii) fasilitator dan staf di kecamatan, kabupaten dan provinsi; (iii) LSM dan penyedia layanan sektor swasta; dan (iv) Kementerian Koordinator RakyatKesejahteraan, Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.³²

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perpedesaan Pertanian di Kabupaten Jayawijaya dapat penilaian opini berhasil. Penilaian ini menjadi motivasi kepada kelompok tani untuk terus berusaha, memanfaatkan program ini dengan bercocok tanam, berkebun, beternak untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Sejak PNPM Mandiri Perpedesaan Pertanian dikururkan pemerintah pusat di 11 distrik di Kabupaten Jayawijaya 2012, terdapat 150 kelompok tani yang bergerak di bidang usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Usaha masyarakat kemudian berhasil. Bahkan mereka menjual ternak dengan harga dua kali lipat dari harga biasa.³³

PENUTUP

Masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Indonesia masih menjadi masalah besar. Terlebih penyebaran pembangunan yang tidak merata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal. Terkhususnya di wilayah Indonesia Timur yang meliputi Papua, Sulawesi, dan Maluku yang merupakan

wilayah yang paling banyak penduduk miskin di Indonesia.

Dalam menyelesaikan masalah dalam negeri, pemerintah biasanya mendapatkan bantuan dari banyak pihak termasuk organisasi internasional yang tergabung dalam negara-negara didalamnya. Organisasi yang menangani masalah kemiskinan dan pembangunan perekonomian di daerah pedesaan ialah *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). IFAD merupakan salah satu organisasi dibawah PBB yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan berbentuk pinjaman atau modal yang dipergunakan untuk pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan.

IFAD sendiri sudah memberikan bantuan ke Indonesia sejak tahun 1980-an dan sasarannya yang ditunjukkan ialah masyarakat Indonesia Timur seperti Papua, Sulawesi, dan Maluku. Pada bulan Desember 2008, Dewan Eksekutif IFAD telah menyetujui Program Strategis IFAD (COSOP) untuk Indonesia periode 2009-2013. Dengan demikian IFAD mempunyai program-program yang dijalalankannya untuk mengembangkan perekonomian pedesaan.

International Fund for Agricultural Development (IFAD) merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini didirikan pada Desember 1977 yang berkantor pusat di Roma, Italia. Pembentukan IFAD merupakan tindak lanjut atas salah satu hasil utama dari Konferensi Pangan Dunia (*World Food Conference*) yang diselenggarakan pada tahun 1974. Konferensi tersebut diselenggarakan sebagai respon terhadap krisis pangan yang terjadi pada awal 1970-an terutama yang melanda negara-negara di Afrika. Konferensi tersebut memutuskan “dana internasional” untuk negara-negara berkembang.

Dalam Visi nya, IFAD bertujuan untuk menjadi katalis global investasi yang memungkinkan untuk pertanian rakyat

³¹*Ibid.*,

³²*Ibid.*,

³³*PNPM sukses di Kab. Jayawijaya*. Dalam <http://suluhpapua.co/read/214053/2013/10/23/pnpm-mandiri-pertanian-sukses-di-jayawijaya/> diakses pada 18 April 2016, Pukul. 12:53 Wib

sehingga mendorong kemajuan menuju ketahanan pangan dan gizi, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan ekosistem. Misi IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan dengan tujuan menghapuskan kemiskinan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75% penduduk miskin di dunia.

Wilayah Papua merupakan wilayah termiskin di Indonesia. Wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumberdaya alam sangat besar di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah. Wilayah Pulau Papua terletak di posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Dengan posisi tersebut, pengembangan wilayah Pulau Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama sebagai akibat dari ketertinggalan dan keterisolasian. Permasalahan tersebut antara lain: (1) tingginya angka kemiskinan, (2) rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan, (3) tingginya angka pengangguran, dan (4) terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial. Selain itu, wilayah Papua juga menghadapi berbagai permasalahan gangguan ketertiban dan keamanan, serta konflik sosial.

Berbagai permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) rendahnya akses terhadap layanan jasa pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, (2) terbatasnya kegiatan ekonomi produktif yang menyerap angkatan kerja, (3) rendahnya investasi, (4) terbatasnya prasarana dasar seperti air minum dan sanitasi, jalan, pelabuhan, dan listrik, dan (5) terbatasnya akses terhadap layanan transportasi yang menghubungkan antarwilayah.

Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) yang berinvestasi dalam masyarakat pedesaan.

Memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan memperkuat ketahanan. Sejak tahun 1978, IFAD telah menyediakan hamper US \$17 miliar dalam hibah dan pinjaman berbunga rendah untuk proyek-proyek yang telah membantu masyarakat miskin pedesaan. IFAD adalah lembaga keuangan internasional dan badan PBB khusus yang berbasis di Roma - pangan dan pertanian hub PBB.

IFAD di Indonesia sudah sejak tahun 1980. IFAD telah membuat proyek dan bekerja di daerah terpencil yang rentan. Biasanya di negara-negara dengan kondisi kemiskinan tertinggi. Di Papua misalnya, IFAD masuk melalui proyek PNPM Pedesaan Pertanian. IFAD juga berhasil mendukung masyarakat pesisir dengan mampu membantu mereka dari guncangan perubahan iklim dan dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan nelayan. Perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

IFAD memfasilitasi kemitraan untuk dampak dan sumber daya yang maksimal. IFAD telah berhasil memfasilitasi sejumlah publik-swasta-kemitraan baik dengan perusahaan internasional dan perusahaan nasional. Mengingat potensi produksi komoditas yang signifikan di Indonesia, yang memberikan manfaat bagi petani kecil akan semakin mendapatkan pentingnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman bernilai tinggi. IFAD dapat mengidentifikasi dan menerapkan kemitraan ini.

IFAD mendukung kerangka kebijakan. Efektif pertanian dan perikanan membutuhkan lingkungan peraturan dan kebijakan yang mendukung. IFAD memiliki pengetahuan, pengalaman dan sumber daya internasional untuk mendukung pengembangan program yang efektif dan kebijakan untuk petani kecil.

Keanggotaan Indonesia dalam IFAD memberikan berbagai manfaat, di antaranya Indonesia dapat memperoleh bantuan program melalui proyek-proyek termasuk pembiayaannya dalam bentuk pinjaman berjangka panjang (40 tahun) dengan bunga rendah; Proyek-proyek IFAD diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ditujukan secara khusus kepada masyarakat miskin di daerah terpencil yang berbasis pertanian; IFAD menyelenggarakan workshop tentang pengumpulan data dan penyebaran informasi mengenai proyek-proyek IFAD guna pelaksanaan proyek-proyek secara lebih baik di masa datang; Indonesia menerima masukan mengenai penanggulangan kemiskinan khususnya di daerah marjinal di negara-negara berkembang.

Adapun bantuan/pinjaman IFAD sampai dengan tahun 2011 berkisar US\$776,3 juta yang US\$ 387,7 juta di antaranya merupakan "loan" dan terdiri dari 14 proyek. Pada akhir 2011, tersisa 3 (tiga) proyek yang belum diselesaikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Di wilayah Papua, IFAD membuat 2 program yang berada di wilayah tersebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Coastal Community Development Project (CCDP).

DAFTAR PUSTAKA

- Levine, David P and Abu Turab Rizvi. (2005), *Paverty Work Freedom; Political Economy and the Moral Order*, hal. 41 Cambridge University Press, Cambridge.
- M. Saeri. *Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatic*, Jurnaltransnasional, vol.3, No. 2, februari 2012
- Rosmeli Nurhayani, *Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia*, Universitas Riau Mankeu, Vol.3 No.1, 2014: 374-463. Diunduh dalam <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/mankeu/article/download/1861/1226>. Diakses pada 14 April 2016 Pukul. 15:25 Wib
- 10 *Provinsi Paling Miskin di Indonesia*, dalam <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/173118-10-propinsi-paling-miskin-di-indonesia> diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 15:30 Wib
- Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/34> diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 13:30 Wib
- Geografi Indonesia*, dalam <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia> diakses pada 9 April 2016 Pukul. 16:20 Wib
- IFAD in Indonesia*, dalam <http://www.ifad.org/media/success/indonesia.htm> diakses pada 4 Maret 2016 pukul. 17:20 Wib
- International Fund for Agricultural Development*, dalam <http://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lambarinformasi/Pages/INTERNATIONAL-FUND-FOR-AGRICULTURAL-DEVELOPMENT-IFAD.aspx> diakses pada 5 Maret pukul. 12:10 Wib
- IFAD's Strategic Vision to 2015*, dalam <https://www.ifad.org/documents/10180/ec3289d0-77cf-4ba6-bd60-1808cc469632>. Diakses pada 7 April 2016, pukul. 10:36
- IFAD member states". International Fund for Agricultural Development*, dalam <http://www.ifad.org/governance/ifad/m>

- [s.htm](#) diakses pada 7 April 2016 Pukul. 11:12 Wib
- Investin in Rural People in Indonesia*, dalam <https://www.ifad.org/documents/10180/98c0dba4-1d1d-4c6b-9b79-0b85f759cab1>. Diakses pada 16 April 2016 Pukul. 23:35 Wib
- Income-Generating Project for Marginal Farmers and Landless*, dalam http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/indonesia/215/project_overview diakses pada 17 April 2016 Pukul. 18:22 Wib
- Kemiskinan*, dalam <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/57478/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada 14 April 2016 Pukul. 15:00 Wib
- Masalah Kemiskinan Indonesia*, dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-38108-1311030019-Chapter%201.pdf>. Diakses pada 14 April 2016 Pukul. 15:09 Wib
- Mendorong Masyarakat Miskin di Pedesaan untuk mengatasi kemiskinan Indonesia*, dalam http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pi/factsheets/indonesia_bahasa.pdf. diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 16:04 Wib
- National Programme for Community Empowerment in Rural Areas*, dalam http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/indonesia/1341/project_overview diakses pada 17 April 2016 Pukul. 20:31 Wib
- Pengembangan Wilayah Papua tahun 2012*. http://bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11240/3770/. Diakses pada 4 April 2016 Pukul. 19:00 Wib
- PNPM sukses di Kab. Jayawijaya*. Dalam <http://suluhpapua.co/read/214053/2013/10/23/pnpm-mandiri-pertanian-sukses-di-jayawijaya/> diakses pada 18 April 2016, Pukul. 12:53 Wib
- President's Report National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project*, dalam <https://www.ifad.org/documents/10180/cf582a6e-b684-4c96-90c1-95db5138fd29> diakses pada 17 April 2016, Pukul. 21:12 Wib
- Statistics Human Development Reports (HDR) United Nations Development Programme (UNDP)*, dalam <http://hdr.undp.org/en/statistics/> diakses pada 4 Maret 2016 Pukul. 12:10 Wib
- Who we are*, dalam <https://www.ifad.org/who/overview> diakses pada 7 April 2016 Pukul 10:15 Wib